

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Evaluasi Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran						Biro Organisasi	Melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permenpan 20/2018 dan Permendagri 99/2018 (11 indikator)	Laporan evaluasi kelembagaan Permenpan 20/2018 dan Permendagri 99/2018
									Melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permendagri 99/2018	Laporan evaluasi kelembagaan Permendagri 99/2018
									Melaksanakan penataan kelembagaan	Kebijakan penataan kelembagaan
2	Pembentukan kelembagaan berbasis kinerja	Persentase pengusulan kelembagaan berbasis kinerja (Rumus=jumlah usulan kelembagaan berdasarkan proses bisnis dan pohon kinerja/jumlah usulan kelembagaan)	-	30%	40%	50%	60%	Biro Organisasi	Memproses pengusulan kelembagaan berdasarkan aturan yang berlaku	Rekomendasi Kelembagaan
									Memproses pengusulan kelembagaan sesuai dengan proses bisnis	Rekomendasi Kelembagaan
									Memproses pengusulan kelembagaan dengan mempertimbangkan kinerja utama	Rekomendasi Kelembagaan utama
IV PROGRAM: PENATAAN TATALAKSANA Sasaran: - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kerja dan operasional Pemerintah Provinsi Bali - Meningkatkan kualitas pengelolaan SPBE yang terintegrasi - Meningkatkan kualitas penerapan Keterbukaan Informasi Publik - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip - meningkatkan pengelolaan pengadaan barang jasa										
1	Penerapan Proses bisnis dan SOP	Persentase PD yang memiliki Peta Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku	60%	65%	70%	75%	80%	Biro Organisasi	Menyusun/mengupdate peta proses bisnis Pemprov. Bali sesuai pedoman yang berlaku (Permenpan 19 tahun 2018)	Peta Proses Bisnis Pemprov. Bali
		Persentase PD yang memiliki SOP sesuai pedoman yang berlaku	85%	90%	93%	95%	100%		Memberikan pembinaan dalam penyusunan probis dan SOP	- Laporan pembinaan Proses Bisnis - Laporan pembinaan SOP
		Persentase PD yang telah menerapkan SOP dengan baik	70%	75%	75%	80%	80%		Melakukan movev terhadap penerapan Probis dan SOP	Laporan movev Proses Bisnis
2	Penerapan E-Government	Persentase aplikasi Pemprov Bali yang terimplementasi dengan baik	75%	80%	85%	90%	95%	Diskominfo	Menyusun peta rencana SPBE	Road Map SPBE
		Persentase aplikasi Pemprov Bali yang terintegrasi	20%	25%	30%	35%	40%		Membentuk Tim Koordinasi SPBE	SK Tim Koordinasi SPBE
									Menerapkan manajemen layanan SPBE	Laporan Evaluasi manajemen layanan SPBE
									Mengelola layanan internal pemerintah berbasis elektronik (aplikasi kepegawaian, perencanaan, penganggaran, kinerja, dll)	Rekap layanan internal pemerintah berbasis elektronik
									Mengelola layanan publik berbasis elektronik	Rekap layanan publik berbasis elektronik
									Mengintegrasikan aplikasi Pemprov. Bali	Rekap aplikasi terintegrasi
3	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase PD yang mempublikasikan DIP yang terupdate	70%	75%	75%	80%	80%	Diskominfo	Menyusun kebijakan KIP	Kebijakan KIP dan SOP
		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		Pembinaan kebijakan KIP	Laporan pembinaan
		Persentase sengketa informasi yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Monev kebijakan KIP	- Laporan monev - Rekap permohonan informasi
4	Pengelolaan Arsip yang berkualitas	Indeks Kearsipan	60	61	62	63	64	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Menyusun kebijakan ttg kearsipan	Kebijakan KIP dan SOP
		Persentase PD mendapat hasil audit internal arsip baik	40%	50%	60%	70%	80%		Pembinaan kebijakan kearsipan	Laporan pembinaan
									Monev kebijakan kearsipan	Laporan audit/monev arsip ke PD
5	Kualitas Pengadaan Barang Jasa	Persentase jenis pengadaan yang dilakukan secara elektronik	86%	90%	95%	100%	100%	Biro PBJ	Mengelola pengadaan secara elektronik	Laporan pengadaan secara elektronik
									Meningkatkan kualitas kelembagaan UKPBJ	

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	Program: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.									
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase PD yang memiliki pegawai sesuai dengan perhitungan kebutuhan pegawai	50%	60%	70%	80%	90%	Biro Organisasi BKD	Menyusun Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen Anjab ABK
		Persentase jumlah formasi yang diusulkan utk perekrutan/Jumlah Pegawai yang pensiun	60%	70%	80%	90%	95%		Melaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Peta Jabatan	Dokumen Peta Jabatan
									Menyusun rencana redistribusi pegawai	Dokumen redistribusi pegawai
									Menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun	Dokumen proyeksi kebutuhan 5 tahun
									Menghitung formasi jabatan	Dokumen formasi jabatan
2	Penerimaan Pegawai								Mengumumkan penerimaan pegawai secara luas ke masyarakat	Pengumuman penerimaan
									Melaksanakan pendaftaran secara online	
									Melaksanakan proses seleksi	
									Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Persentase pegawai yang telah di assessment	4%	5%	10%	15%	20%	Biro Organisasi BKD BPSDM	Menyusun/mengupdate SKJ	SKJ
		Gap kompetensi pegawai	-	20%	20%	20%	20%		Mengevaluasi kompetensi pegawai berdasarkan SKJ	Hasil Evaluasi Kompetensi Pegawai
		Persentase pegawai yang mengikuti diklat berbasis kompetensi	60%	70%	80%	85%	90%		Menghitung gap kompetensi	Gap Kompetensi
		Persentase pegawai dengan hasil diklat baik	60%	70%	80%	85%	90%		Menyusun/mengupdate data kompetensi pegawai	Data Kompetensi Pegawai
									Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	dokumen analisis kebutuhan diklat
									Menyusun kebijakan coaching dan mentoring	Kebijakan coaching dan mentoring
									Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	
									Mengevaluasi kebijakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Laporan movev kebijakan pengembangan pegawai
4	Penetapan kinerja individu	Persentase pegawai yang sudah menetapkan sasaran kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	Pengumpulan SKP	Data SKP Pemprov. Bali
		Persentase pegawai yang sudah mengukur SKP secara berkala	-	-	100%	100%	100%		Mengelola penginputan SKP melalui aplikasi Sikepo	Data SKP Pemprov Bali melalui aplikasi sikepo
		Rasio kontribusi capaian kinerja terhadap penghitungan tunjangan kinerja	-	-	30%	40%	50%		Mengukur kinerja individu secara periodik	Realisasi PK Kinerja
									Melaksanakan movev atas pencapaian kinerja individu	Laporan movev RB
									Menganalisa hasil penilaian kinerja individu untuk dijadikan dasar pengembangan karir dan penghargaan	

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai Rumus= (Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini) kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya Persentase pegawai yang diberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan	10%	10%	10%	10%	10%	BKD	Menetapkan kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku Memberikan pembinaan kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku Melaksanakan monev utk kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku Melaksanakan pemberian sanksi dan imbalan	Kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku Laporan pembinaan disiplin/kode etik/kode perilaku Laporan monev disiplin/kode etik/kode perilaku Mekanisme dan SOP sanksi dan imbalan
5	Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaianya yang mutakhir pada aplikasi Simpeg	100%	100%	100%	100%	100%	BKD	mengelola pemutakhiran sistem informasi kepegawaian oleh tiap individu	Data Simpeg yang mutakhir
6	Manajemen talenta	Persentase Jabatan Administrasi yang ditetapkan melalui proses manajemen talenta	-	50%	60%	70%	80%	BKD	melaksanakan assessment pegawai melaksanakan proses manajemen talenta	Hasil assessment pegawai
7	Promosi Jabatan	Persentase JPT melalui seleksi terbuka						BKD	menyusun kebijakan promosi terbuka menyusun Tim pelaksana promosi terbuka Melaksanakan promosi terbuka Mengumumkan promosi terbuka	Pergub kebijakan promosi terbuka SK Tim Pelaksana Promosi Terbuka Pengumuman promosi terbuka
8	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Persentase kelas dan nilai jabatan yang terupdate						Biro Organisasi	menyusun informasi faktor jabatan menyusun kelas dan nilai jabatan Melaksanakan evaluasi berdasarkan SKJ	Informasi faktor jabatan Kelas dan nilai jabatan Hasil Evaluasi
VI	Program: PENGUATAN AKUNTABILITAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja									
1	Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan	Persentase PD yang Renstranya selaras dengan RPJMD Persentase anggaran yang berhasil difokuskan untuk mendukung kinerja utama organisasi Rumus= jumlah anggaran yg difokuskan/jumlah anggaran total Persentase PD yang Pohon Kinerjanya Baik Persentase PD dengan hasil review LKJP Baik Persentase PD yang sasaran Kinerja Organisasinya mencapai target	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda	Menerapkan penyusunan pohon kinerja Menyusun Renstra dengan melibatkan pimpinan	pohon kinerja Renstra
			75%	75%	80%	80%	85%	Biro Organisasi	Menyusun Renja dengan melibatkan pimpinan Melakukan refocusing anggaran Menyusun Penetapan Kinerja Organisasi dengan melibatkan pimpinan Memantau capaian renja Memantau capaian PK Organisasi	Renja Data refocusing anggaran IKU PK Organisasi realisasi renja realisasi IKU realisasi PK Organisasi
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Persentase PD yang memiliki PK Individu baik Persentase PD yang mengukur PK secara berkala dan tepat waktu Jumlah aplikasi pengukuran kinerja yang terimplementasi dengan baik	-	75%	80%	85%	90%	Biro Organisasi	Menyusun kebijakan SAKIP Melaksanakan peningkatan kapasitas implementasi SAKIP kepada pegawai Melakukan pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala Menginput data kinerja ke aplikasi	Kebijakan SAKIP Laporan pembinaan SAKIP - Data PK - Data Realisasi PK Data Kinerja

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	Program: PENGUATAN PENGAWASAN bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN									
1	Gratifikasi	Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Melaksanakan public campaign anti gratifikasi	- Dokumentasi publik campaign - Laporan public campaign
		Persentase yang telah melaporkan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%		Mengimplementasikan penanganan gratifikasi	SOP dan mekanisme gratifikasi
		Persentase PNS yang telah melaporkan LHKASN	75%	100%	100%	100%	100%		Melaporkan kegiatan gratifikasi kepada UPG Pemrov. Bali	Laporan gratifikasi
									Mengevaluasi kebijakan penanganan gratifikasi	Laporan evaluasi penanganan gratifikasi
									Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	
									Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Data LHKPN
									Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Data LHKASN
2	Penerapan SPIP	Persentase PD yang dengan evaluasi SPIP baik	75%	78%	80%	85%	90%	Inspektorat	Menyusun kebijakan tentang SPIP	Pergub SPIP
							Penyusunan penilaian resiko		Risk Register	
							Pembinaan SPIP		Laporan pembinaan SPIP	
							Monev Penerapan SPIP		Laporan monev SPIP	
3	Penanganan Pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	SOP dan mekanisme penanganan pengaduan
							Mengelola jumlah pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti		Rekap Pengaduan Masyarakat	
							Melakukan evaluasi atas sistem penanganan pengaduan masyarakat		Laporan evaluasi sistem penanganan pengaduan masyarakat	
							Menindaklanjuti hasil evatas sistem penanganan pengaduan masyarakat luas			
4	Whistle-Blowing System (WBS)	Persentase pengaduan melalui WBS yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Menyusun kebijakan WBS	Pergub WBS
		Jumlah aplikasi WBS yang terimplementasi dengan baik	1	1	1	1	1		Membuat aplikasi WBS	Aplikasi WBS
									Memberikan sosialisasi terkait WBS	Laporan sosialisasi WBS
									Mengimplementasikan WBS	SOP dan mekanisme
									Mengelola jumlah pengaduan WBS dan menindaklanjuti	Rekapitulasi pengaduan WBS
									Melakukan evaluasi atas penerapan WBS	Laporan evaluasi WBS
									Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas WBS telah ditindaklanjuti	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Persentase benturan kepentingan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan	Matrik Benturan Kepentingan
		Persentase PD/Unit Kerja yang sebagian besar pegawainya paham tentang benturan kepentingan	75%	80%	85%	90%	95%		Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan sosialisasi penanganan benturan kepentingan
									Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	SOP dan mekanisme
									Mengelola jumlah pengaduan Benturan Kepentingan dan menindaklanjuti	Rekapitulasi pengaduan benturan kepentingan
									Mengevaluasi atas sistem Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan monev sistem penanganan benturan kepentingan
									Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas sistem Penanganan Benturan Kepentingan	
6	Pembangunan Zona Integritas	Persentase unit calon ZI/WBK yang lolos dievaluasi oleh Pusat (MenPANRB)	50%	50%	60%	60%	75%	Biro Organisasi	Mencanangkan zona integritas	Plagam pencanangan ZI
		Persentase unit yang mendapat predikat ZI/WBK dibandingkan calon yang lolos evaluasi	50%	50%	60%	60%	75%		Memberikan sosialisasi tentang zona integritas	Laporan sosialisasi ZI
									Melakukan pembangunan zona integritas secara intensif	Laporan pembangunan ZI

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	SK Penetapan Unit ZI
									Mengevaluasi penerapan zona integritas	Laporan Monev ZI
7	Peran APIP	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yg di TL	85%	87%	90%	92%	94%	Inspektorat	Melaksanakan pengawasan berbasis resiko dan memberikan rekomendasi	Rekomendasi audit
									Peningkatan kapasitas APIP	Data Kompetensi APIP
VIII	Program: PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.									
1	Standar Pelayanan	Persentase PD yang memiliki standar pelayanan sesuai aturan	60%	70%	80%	90%	100%	Biro Organisasi	Menyusun kebijakan standar pelayanan	Kebijakan Standar Pelayanan
									Memberikan pembinaan penyusunan standar pelayanan	Laporan pembinaan standar pelayanan
									Melaksanakan monev atas kebijakan standar pelayanan	Laporan monev kebijakan standar pelayanan
2	Budaya Pelayanan Prima	Persentase pegawai yang paham tentang budaya pelayanan prima	60%	65%	70%	75%	80%	Biro Organisasi	Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	Laporan pembinaan budaya pelayanan prima
		Persentase PD/Unit Kerja yang memiliki inovasi setiap tahun	60%	65%	70%	75%	80%		Pembinaan tentang sistem reward & punishment dan pemberian kompensasi bagi unit layanan	Laporan pembinaan
									Pembentukan sarana layanan terpadu/terintegrasi	Lembaga Dinas PMPTSP
									Pembinaan inovasi pelayanan publik	Laporan pembinaan inovasi
									Pembentukan inovasi pada setiap PD/Unit Kerja	Rekapitulasi inovasi PD
3	Kepuasan Pelayanan	Rata-rata Indeks SKM	77	79	80	81	82	Biro Organisasi	Pembinaan pelaksanaan SKM Prov. Bali	Laporan pembinaan SKM
									Mengkoordinir SKM Pemprov. Bali	
		Persentase PD/Unit Kerja yang melaksanakan SKM	60%	65%	70%	75%	80%		Membuat laporan SKM	Laporan SKM Provinsi Bali
									Mengumumkan indeks SKM	Pengumuman SKM